

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-quran dan terjemahan*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Mizan Buana Kreativa

Buku

- Adjie, Habib. 2004. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habieb. 2004. *Hukum Notaris Indonesia - Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Reflika Aditama.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Cet. 2. Yogyakarta: UII Press
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Cintana, Zahra. 2023. *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Phillipus M. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. 2014, *Telaah Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*. Bandung: Andi Offset.
- Ibrahim, I. S. dan Akhmad, B. A., 2014. *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya Dalam Dinamika Globalisasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kie, Tan Thong. 2005. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kusuma, I Made Hendra. 2021. *Problematika Notaris Dalam Praktik*, Bandung: P. Alumni.
- Makarim, Edmon. 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary)*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Kencana.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisaris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,
- Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nurita, Emma dan Raden Ayu. 2012. *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks.” Dalam Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, disunting oleh Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. 2019. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Sesung, Rusdianto, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, dan Jeffry Tanugraha. 2017. *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A. De. Rozarie
- Soerodjo, Irwan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2004 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Cipayung
- Suriasumantri, Jujun S. 2009. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media
- Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Termoshuizen, Marjanne. 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: P. T. Erlangga.

Tesis

- Agung Fajar Matra. 2012. *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning. 2018. *Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembautan Akta Melalui Cyber Notary*. Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Putri, Indah Aulia. 2021. *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*. Tesis Magister, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta.
- Putri, Zainatun Rosalina; Bakri, Moh.; dan Andrijani, Itta. 2016. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Rosalina, Zainatun, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

<https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf>.

- Sujanoko, Guntur. 2024. *Problematika Penerapan cyber notary dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia*. Tesis Magister, Faklutas Hukum, UNISSULA, Semarang.
- Wijanarko, F. R. 2015. *Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Program Studi S-2 Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Jurnal

- Adjie, Habib. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No 2.
- Agustina, Maya, Andri Nurwandri, Muhammad Andre Yansah, Suci Lestari, Surya Hamdani Sitorus, dan Andi Febriansyah. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Pada Praktik Notaris: Analisa Terhadap Tantangan dan Peluang.” *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 74. DOI: <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.148>.
- Anshori, Iqbal., Rahmi, Elita., & Syamsir. (2022). Polemik penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik. *Recital Review*, 4(2), 353–373. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18863>
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian literatur (systematic literature review): Kendala penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Aulia Nafia, D. M., & Eva Lyanthi, M. (2023). Pengaturan hukum notaris yang membuat akta menggunakan cyber notary di luar wilayah jabatannya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 3419–3437. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6542>
- Denanza Meida Aulia Nafia, Merlin Eva Lyanthi, ‘Pengaturan Hukum Notaris yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary di Luar Wilayah Jabatannya’ (2023) 3 *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol 3, 2023, hlm. 3419-3437.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi birokrasi digital di masa pandemi COVID-19 untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>
- Humaira, M., & Latumeten, P. E. (2022). Comparison of notary deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium during the COVID-19 pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 233–243. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns5.2154>
- Ibrahim, A., Arief, A., & Do Abdullah, S. (2020). Keamanan untuk penerapan layanan publik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE): Sebuah kajian pustaka sistematis. *IJIS – Indonesian Journal On Information System*, 5(2), 135–143. <https://doi.org/10.36549/ijis.v5i2.105>

- Jahar, Asep Saepudin. 2014. "Notaris dan Akad Syariah: Kajian Normatif Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13(2): 47-48.
- Jamil, M. "Pemalsuan Akta Autentik sebagai Aspek Pidana Notaris." *Jurnal Universitas* *Sebelas Maret*, Vol. 7, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40453>.
- Kamini Bharvada, 'Electronic Signatures, Biometrics and PKI in the UK', *International Review of Law Computers & Technology*, Vol. 16, 2002, hlm. 265–275
- Khadafi, M., I. Muda, dan I. Santosa. "Implementasi Hukum Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 09 (2023): 739–751. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.614>.
- La Adu, Arifin; Hartanto, Rudy; dan Fauziati, Silmi. "Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah." *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, Vol. 5, No. 3, Desember 2022, hlm. 215-223. DOI:10.33387/jiko.v5i3.5344.
- Lips, S., Bharosa, N., & Draheim, D. (2020). eIDAS implementation challenges: The case of Estonia and the Netherlands. In *Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia – 7th International Conference, EGOSE 2020* (pp. 75–89). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_6
- Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan regulasi dan pelaksanaan persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat selama pandemi COVID-19. *Jurnal Crepido – Indonesian Journal On Information System*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>
- Makarim, E. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3, 468. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.
- Marlin, S. R., & Mekka Putra, M. F. (2022). Pentingnya penerapan cyber notary sebagai upaya terciptanya keamanan praktik bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3369>
- Mayana, Ranti Fauza & Santika, Tisni. 2021. *Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*. ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 244-262. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Michael Lightowler, 'E-commerce for Notaries in England & Wales', *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, Vol. 4, 2014, hlm. 41.
- Muda, Iskandar. 2020. "Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Konstitusi* 17 (2): 330–54. DOI:10.31078/jk1725.

- Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan *Cyber Notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2011): 76. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Pitriyani, Pipit. 2021. Transformasi Digital Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11, hlm. 8.
- Poetra, Dewatoro Suryaningrat, Fendi Setyawan, and Bhim Prakoso, 'Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan *Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, 2024, hlm. 1465-1477. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6796>.
- Putra, P. O. H., Muda, I., Bakry, M. R., Yusuf, C., & Santosa, I. (2025). A framework for integrated e-notary services based on blockchain for civil law notaries: The case of Indonesia. *International Journal on Informatics Visualization*, 9(1), 153–162. <http://dx.doi.org/10.62527/joiv.9.1.3170>
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya dan A.A. Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 3–4, <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2.720>.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Rahmatullah, Bintang; Artanty, Cindy Alisia; dan Muharman, Dedy. 2024. "Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7(3): 10114–10123. DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31549.
- Ridawati, I. L., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2023). Tanggung jawab notaris atas penggunaan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 99–115. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.60>
- Riyanto, H. R. Benny. (2020). Pembaruan hukum nasional era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161–?. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>
- Rizqiya, A., & Mahfud, M. (2024). Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam era digital. *Notarius*, 17(3). <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 184.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674; Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195.
- Peraturan Pemerintah No. 28/2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Elektronik Terpadu
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2/2009 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Badan Hukum
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

Situs Web

- Cyber-Law,” Arisin.weebly.com, <https://arisin.weebly.com/blog/cyber-law>,
 Irma Devita, “Cyber Notary”, dalam <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>,
- Hukum online, ‘Ikatan Notaris Indonesia Gelar FGD Bahas Implementasi Cyber Notary,’ Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-lt66389e45bf56b/?page=3>.”
- Kementrian Hukum dan HAM. “Sistem Administrasi Badan Hukum (2009). <http://www.sisminbakum.go.id/kumdag/news1a.php>
- Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik,” *Viva Justicia* (29 November 2018), <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>
- Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. “Cyber notary,” (n.d.).<https://mkn.usu.ac.id/images/cybernotary-MKN-USU_compressed_1_reduce_reduce_5.pdf>.
- Melihat Peran Notaris dan PPAT dalam Transformasi Digital*, Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-peran-notaris-dan-ppat-dalam-transformasi-digital-lt6756d9d0e956f/>
- National Association of Secretaries of State. *Remote Electronic Notarization*. (n.d.). Tersedia secara daring di: <https://www.nass.org/initiatives/remote-electronic-notarization>
- “Pemerintah dan INI Bahas Konsep iCyber Notary,” *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary/>
- Penggunaan Sistem Elektronik dalam Menunjang Profesi Notaris*, Hukumonline, diakses 23 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-sistem-elektronik-dalam-menunjang-profesi-notaris-lt63173271cbc7a/>.
- “Peran Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi.” *Tata Negara UI*. Diakses 11 Februari 2025. <https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perlindungan-data-pribadi/>.
- Silvia Lips, Nitesh Bharosa, and Dirk Draheim, ‘eIDAS Implementation Challenges: The Case of Estonia and the Netherlands,’ *Communications in Computer and Information Science*, 2020, hlm. 75–89. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_6
- Stavvy, “Which states allow remote online notarization?” 2023. <<https://blog.stavvy.com/which-states-allow-remote-online-notarization>>.

“Urgensi E-Notary di Saat Pandemi, Pergolakan antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum.” *Notariat Unpas*.
<https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>.

Seminar

- Juwana, Hikmahanto. 2011. Makalah disampaikan pada Seminar “*Cyber Notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*,” Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
- Mayana, Ranti Fauza. 2019. Tantangan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum di Era Globalisasi. Disampaikan dalam Pengenalan dan Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 24 Agustus 2019.
- Miru, Ahmad. 2011. “Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem Hukum di Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris.” Makalah, Seminar Hukum Cyber Notary, Hotel Mercure Makassar, 25 Juni 2011
- Said, Chairunnisa. 2011. Makalah disampaikan pada acara seminar “*Cyber Notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*”, Jakarta: Grand Sahid Jaya Hotel.